
AR RASYIID

Journal of Islamic Studies

Volume 3 (2) (2025) 81-106
ISSN 3025-2970 (print), 2986-5034 (online)
<https://jurnal.staimi.ac.id/index.php/arrasyiid/>
DOI: <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v3i2.31>

FAKTOR ISLAM SEBAGAI DETERMINAN DUKUNGAN INDONESIA TERHADAP KEMERDEKAAN PALESTINA PADA PERIODE PERTAMA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO (2014-2019)

Khaerul Tamimi¹, Kiky Rizky^{2*}, Muhamad Adian Firdaus³

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta^{1,2,3}

khaerultamimi2603@gmail.com¹, kikyrizky@uinjkt.ac.id^{2*}, adian.firdaus@uinjkt.ac.id³

ABSTRAK

Studi ini meneliti Islam sebagai faktor penentu dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tujuannya untuk menganalisis bagaimana Islam berfungsi sebagai penentu yang mempengaruhi sikap pro Palestina Indonesia dari tahun 2014 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-eksplanasi kualitatif, memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara dan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan, menganalisis buku, makalah, artikel jurnal, laporan berita, dan publikasi resmi yang relevan. Analisis menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri dan Konsep Identitas. Temuan menunjukkan bahwa Islam, dalam kondisi tertentu, berfungsi sebagai faktor yang berpengaruh dalam membentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina. Tanggapan Indonesia terhadap keputusan Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel semakin menggarisbawahi orientasi ini. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai aktor negara, cenderung mendukung negara-negara dengan atribut identitas bersama dalam hal ini, Palestina berdasarkan identitas Islam bersama dan bertindak dengan cara yang konsisten dengan komitmen berbasis identitas yang lebih luas.

Kata kunci: Islam, Identitas, Kebijakan Luar Negeri Indonesia

ABSTRACT

This study examines Islam as a determining factor in Indonesia's support for Palestinian independence during the first period of President Joko Widodo's administration. The aim is to analyze how Islam functioned as a determinant that influenced Indonesia's pro-Palestinian stance from 2014 to 2019. This study uses a qualitative descriptive-explanatory method, utilizing primary and secondary data. Primary data is derived from interviews and secondary data is collected through library research, analyzing books, papers, journal articles, news reports, and relevant official publications. The analysis uses Foreign Policy Theory and the Concept of Identity. The findings show that Islam, under certain conditions, functions as an influential factor in shaping Indonesia's support for Palestine. Indonesia's response to the United States' decision to recognize Jerusalem as Israel's capital further underscores this orientation. Overall, these findings suggest that Indonesia, as a state actor, tends to support states with shared identity attributes in this case, Palestine based on a shared Islamic identity and act in a manner consistent with broader identity-based commitments.

Keywords: Islam, Identity, Indonesian Foreign Policy

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas Islam sebagai faktor determinan dukungan Indonesia terhadap Palestina selama rentang tahun 2014-2019. Di Indonesia, agama khususnya Islam menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara ideologis Indonesia bukanlah negara Islam atau negara sekuler, tetapi Indonesia merupakan negara Pancasila yang menempatkan agama-agama, termasuk Islam di posisi yang penting. Mayoritas umat Islam di Indonesia telah menerima Pancasila sebagai dasar ideologi, hanya ada sedikit pertanyaan tentang ideologi nasional dan bentuk negara Indonesia. Pertanyaan yang paling sering muncul terkait sejauh mana Islam (lebih tepatnya umat Islam) menjadi faktor dalam kebijakan domestik maupun kebijakan luar negeri (Azra, 2000: 5).

Setelah Perang Dingin berakhir, agama menjadi salah satu aspek yang penting dalam hubungan internasional kontemporer. Adanya tesis *Clash of Civilizations* Samuel Huntington dan peristiwa penyerangan gedung WTC New York pada 11 September 2001 semakin menguatkan minat kajian terhadap hubungan antara agama dan hubungan internasional. Akibatnya, fokus akademis terhadap peran agama dalam hubungan internasional semakin meningkat dan berkembang. Pada saat yang sama para pembuat kebijakan dan praktisi juga mulai menaruh perhatian serius terhadap pengaruh agama dalam urusan global serta kebijakan luar negeri (Schwar & Lynch, 2016: 1-3).

Kemunculan aspek agama mendorong berbagai diskusi, pertanyaan, dan perdebatan tentang relevansi agama dan hubungan internasional. Agama memiliki ciri khas identitas pada tingkat yang berbeda dengan individu hingga transnasional (seperti misalnya peradaban seperti dalam tesis *Clash of Civilizations*). Dalam konteks ini menurut Jonathan Fox dan Shmuel Sandler, agama sebagai: (1) kekuatan yang memengaruhi pandangan masyarakat dunia, (2) aspek identitas, (3) sumber legitimisasi, termasuk legitimasi politik, dan (4) terkait dengan institusi formal yang dapat memengaruhi proses politik (Fox dan Sandler, 2004: 2) Salah satu topik yang menarik untuk dibahas mengenai keterkaitan agama dan hubungan internasional adalah tesis Samuel Huntington, yaitu *Clash of Civilizations*. Dalam tesisnya Huntington memberikan contoh yang paling mencolok dalam mengaitkan agama dengan konflik dalam hubungan internasional. Ia menegaskan, bahwa agama tidak hanya penting dalam hubungan internasional, tetapi agama akan terus menjadi salah satu kekuatan pendorong konflik di masa depan. Secara khusus, Huntington berargumen bahwa "peradaban-peradaban" global akan bersaing untuk memperebutkan nilai-nilai budaya dan agama tertentu (Huntington, 1993: 29).

Para akademisi lain dari berbagai perspektif dan pendekatan, seperti Peter L. Berger dalam buku *The Desecularizations of The World: Resurgent Religion and World Politics*, Susanne H. Rudolph dan James Piscatori dalam *Transnational Religion and Fading States*, Jonathan Fox dan Shmuel Sandler dalam *Bringing Religion into International Relations* memberikan studi empiris tentang peran agama dalam hubungan internasional dan politik global. Mereka berusaha untuk mengambil pendekatan yang lebih bermuansa dan spesifik dalam karya mereka mengenai hubungan antara agama dan hubungan internasional (Berger, 1999; Rudolph dan Piscatori, 1997; Fox dan Sandler, 2004).

Agama telah menjadi bagian dari sudut pandangan manusia dan dapat memengaruhi persepsi tindakan mereka terhadap suatu peristiwa. Meskipun ada sebagian orang saat ini tidak terlalu mementingkan agama, tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat-saat tertentu agama menjadi sangat penting setidaknya bagi para pembuat kebijakan (Fox, 2001: 60-63). Terdapat dua cara potensial di mana agama dapat memengaruhi kebijakan luar negeri. Pertama, sistem kepercayaan agama dapat memengaruhi pandangan dan perilaku para pembuat kebijakan luar negeri, kedua agama dapat secara langsung memengaruhi keputusan para pembuat kebijakan melalui batasan-batasan yang diberikan kepada para pembuat kebijakan oleh kepercayaan yang dianut secara luas di dalam populasi masyarakat yang mereka wakili (Fox, 2001: 60-63).

Dalam konteks Indonesia, Islam menjadi agama mayoritas. Indonesia merupakan

negara dengan mayoritas penduduk muslim dengan perkiraan mencapai 231 juta orang atau 86,7% dari jumlah populasi penduduk Indonesia (*Muslim Population by Country 2024*). Indonesia dikenal sebagai negara demokratis yang kaya akan budaya, dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila masyarakat Indonesia hidup rukun, damai, dan penuh toleransi. Salah satu hal yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara dengan toleransi antarumat beragama yang sangat dominan, Islam Indonesia dikenal dengan Islam yang damai, apresiatif, Islam tidak membeda-bedakan. Pernyataan ini sering dilontarkan oleh para tokoh muslim moderat di Indonesia. Mereka berusaha keras untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang ramah, damai, dan penuh kedamaian. Posisi ini membuat dunia Islam berharap Indonesia dapat berkontribusi dalam peradaban global. Setidaknya esensi Islam yang diwujudkan di Indonesia dapat menjadi contoh bagi budaya internasional, terutama di negara-negara yang sedang mengalami konflik (Ronaldi et al., 2023:110).

Cara Islam menyebar dan berkembang di Indonesia telah memberikan kontribusi pada karakteristik khas Islam di Indonesia yang sangat berbeda dengan Islam di Timur Tengah. Islam di Indonesia secara umum dianggap sebagai Islam yang moderat, toleran, dan pluralis. Penerimaan pluralisme agama, sosial, dan politik oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam ini yang kemudian menjadi kunci keberhasilan demokrasi di Indonesia. Hal ini juga memengaruhi Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya, baik secara domestik maupun dalam melakukan hubungan luar negeri (Anwar, 2010:43).

Secara signifikan Islam di Indonesia memiliki dampak yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara agama, ekonomi, sosial, politik maupun budaya (Azra, 2013:63). Banyak yang beranggapan bahwa Islam telah memainkan peran utama dalam pembuatan kebijakan, baik secara domestik maupun kebijakan luar negeri. Dalam kebijakan luar negeri Indonesia, agama, khususnya Islam telah menjadi diskursus tersendiri. Secara historis identitas Islam telah digunakan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Umar (dalam Tamimi, 2025: 8-9) menyatakan, bahwa setidaknya terdapat tiga wacana Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Wacana pertama terjadi pada era Presiden Soekarno dan Soeharto. Pada saat itu mereka mengartikulasikan Islam sebagai identitas agama, dalam artian Islam dalam kebijakan luar negeri hanya untuk melegitimasi kerja sama dengan negara muslim saja. Contohnya, pada era Soekarno, banyak interaksi dengan negara mayoritas muslim, seperti Pakistan dan Mesir. Dalam kasus Pakistan pada Perang Kashmir 1965, Soekarno menggunakan retorika Islam untuk mengungkapkan bentuk solidaritas sesama negara mayoritas muslim. Dalam kasus ini Islam dinyatakan sebagai basis utama hubungan antara Indonesia dan Pakistan. Kasus ini menjadi pembuktian bahwa adanya wacana Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia sebagai “identitas agama” yang digunakan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara muslim (Umar, 2016: 411). Di era Soekarno Islam bukanlah determinan utama dalam kebijakan luar negerinya, tetapi pada saat tertentu digunakan untuk melegitimasi kebijakan terhadap negara-negara berpenduduk muslim lainnya. Islam adalah agama terbesar di Indonesia dan Islam digunakan sebagai pengikat budaya dalam hubungan diplomatik dengan negara lain.

Tidak berbeda jauh dengan Soekarno, Soeharto masih menggunakan Islam dalam kebijakan luar negerinya sebagai legitimasi dalam melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara muslim. Dalam kasus tertentu Soeharto menggunakan Islam untuk menjaga kerja sama. Indonesia terlibat aktif dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan beberapa kali berkontribusi dalam konflik Palestina dan Israel, Revolusi Iran, pendudukan Uni Soviet di Afghanistan, invasi Irak ke Kuwait, dan konflik agama di Bosnia (Suryadinata, 1995:292).

Wacana kedua terjadi ketika era Presiden Abdurrahman Wahid. Dapat dikatakan pada masa ini Islam mempunyai sedikit ruang dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Abdurrahman Wahid berusaha berupaya mengartikulasikan Islam Moderat sebagai proyek politik yang didasarkan pada tradisi intelektual Islam Indonesia. Ia mencoba mengartikulasikan kembali “*identitas*” dalam hubungan luar negeri suatu negara. Penunjukan intelektual Islam

Alwi Shihab sebagai menteri luar negeri dapat dilihat sebagai upaya untuk memasukkan kembali aspek Islam ke dalam kebijakan luar negeri Indonesia (Umar, 2016: 415). Wacana ketiga terjadi pada era presiden-presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka berupaya untuk mengartikulasikan Islam Moderat sebagai proyek politik dan memasukkannya ke dalam agenda *Global War Against Terrorism*. Dalam wacana ketiga ini pemerintah mencoba membangun identitas Islam untuk menjelaskan dan membenarkan kebijakannya terkait respons terhadap perang AS di Afghanistan kepada konstituen muslim dalam negeri yang menentang perang. Kasus ini menunjukkan, bahwa pemerintah di bawah kementerian luar negeri telah memecahkan dilema identitas. Kemlu RI sekarang sudah dapat menggunakan simbol-simbol Islam untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan di luar negeri (Salim, 2020:38).

Tiga wacana Islam dan kebijakan luar negeri tersebut menjadi bukti bahwa adanya pertautan antara agama, khususnya Islam dengan Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Pertautan ini telah menjadi diskursus tersendiri dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Berkaitan dengan topik Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dapat dilihat dari dukungan Indonesia terhadap Palestina. Indonesia sejak dulu selalu konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Pada masa Presiden Soekarno dukungan ini dimaknai dengan kecaman dari segala bentuk imperialisme, kolonialisme, dan penindasan tidak manusiawi yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Maka dari itu, selama masa kepresidenannya, Soekarno menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Isu ini kemudian diangkat pada Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan pada bulan April 1955 di Bandung. Acara ini diselenggarakan di bawah semangat antikolonialisme dengan mengundang Palestina dan tidak mengikutsertakan Israel (Bachtier et al., 2021: 2-4).

Pada era Soeharto, Indonesia menganggap perjuangan Palestina merupakan sesuatu yang sakral dan menjadi gerakan global dalam melawan kolonialisme. Hal ini membuat keberpihakan Indonesia terhadap Palestina dan tidak adanya pengakuan terhadap Israel. Dukungan terhadap perjuangan Palestina didasarkan pada prinsip keadilan yang juga menjadi prinsip kebijakan luar negeri dan faktor kesamaan agama menjadi faktor tambahan. Di sisi lain, Indonesia menentang Israel dengan alasana bahwa mereka adalah agresor yang telah menduduki wilayah-wilayah Arab dan Israel telah menolak hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sendiri (Sukma, 2003: 48). Indonesia sempat mengesampingkan untuk membuka kantor perwakilan *Palestinian Liberation Organizations* (PLO) di Jakarta pada tahun 1974. Pada tahun 1989 PLO diizinkan untuk membuka kantor perwakilannya di Indonesia. Pada saat itu Indonesia mulai memberi perhatian lebih besar kepada negara-negara Islam (Anwar, 2010:49).

Selama pemerintahan Habibie, tidak ada dukungan khusus Indonesia kepada Palestina. Hal ini dikarenakan pada masa pemerintahan Presiden Habibie lebih disibukkan mengurus penentuan nasib sendiri untuk Timor Timur dan mengatasi masalah politik dalam negeri yang pada saat itu sedang terjadi reformasi. Setelah masa Habibie berakhir, pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati melanjutkan kebijakan mendukung Palestina dan mencoba mendesak Israel untuk mengakui kemerdekaan Palestina (Muttaqien, 2013: 67).

Presiden Abdurrahman Wahid tidak hanya mendukung hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, tetapi Wahid juga bertindak sebagai pelopor perdamaian antara Israel dan Palestina. Wahid berempati terhadap perjuangan Palestina, sikapnya terhadap masalah ini didasarkan pada retorika perdamaian, kemanusiaan, toleransi beragama, dan pluralisme. Ini kemudian menghasilkan dukungannya untuk perdamaian antara Israel dan Palestina. Menurutnya kemerdekaan dan kedaulatan kedua negara harus diakui (Bachtier et al., 2021: 6-7).

Dukungan terhadap Palestina terus berlanjut pada masa pemerintahan Megawati. Pada pertemuan puncak Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur pada tahun 2002,

Indonesia di bawah kepemimpinan Megawati berkomitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan mengkritik negara-negara Barat yang tidak adil dalam memperlakukan rakyat Palestina. Saat Israel menyerang Ramallah dan Bethlehem pada Maret 2002, Megawati juga mengutuk serangan Israel tersebut dan pemerintah Indonesia memberikan bantuan keuangan kepada Otoritas Palestina di bawah kepemimpinan Yasser Arafat (Muttaqien, 2013: 68).

Pada masa pemerintahan SBY dukungan Indonesia terhadap Palestina terus berlanjut. Indonesia memiliki hubungan yang harmonis dengan Palestina. Pada tahun 2008, Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda mengundang perwakilan Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika (NAASP) ke Konferensi Tingkat Menteri NAASP tentang Peningkatan Kapasitas di Palestina.

Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa NAASP akan berkomitmen untuk mendukung 10.000 warga Palestina melalui program pembangunan dalam waktu lima tahun. Dalam kesempatan tersebut, Presiden SBY menyampaikan tekadnya untuk turut serta mewujudkan proyek tersebut dengan memberikan pelatihan kepada 1000 warga Palestina (Kemlu, 2019d).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia dari masa ke masa telah secara konsisten mendukung Palestina untuk meraih kemerdekaannya secara penuh. Namun, bagaimana halnya pula ini terjadi dalam masa periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo? Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut di atas, yaitu bagaimana faktor Islam dapat menjadi determinan dalam memengaruhi dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dalam masa periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sekaligus memperkaya kajian terkait dengan peran agama dalam hubungan internasional, termasuk dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia.

Kerangka Teori

1. Kebijakan Luar Negeri

Rosenau mengkonsepsikan kebijakan luar negeri dalam tiga kategori; pertama, kebijakan luar negeri sebagai seperangkat orientasi (*a cluster of orientation*) Dalam hal ini, Rosenau melihat kebijakan luar negeri sebagai ide-ide atau gagasan yang menjadi pedoman dari pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu negara. Pemikiran dihasilkan dari pengalaman sejarah dan persepsi masyarakat terhadap posisi negaranya yang strategis dalam politik internasional. Kedua, kebijakan luar negeri sebagai rencana dan komitmen untuk bertindak (*as a set of commitment and plans for action*) Rosenau melihat kebijakan luar negeri merupakan strategi yang dihasilkan oleh elit politik untuk menjawab tantangan dan hambatan dari faktor eksternal. Ketiga, kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku (*as a form of behavior*) dalam konteks ini Rosenau melihat bahwa kebijakan luar negeri sebagai sebuah langkah yang harus diambil oleh *policymaker* dalam merespon sesuai dengan situasi dan keadaan. Implementasi dari perilaku negara dapat berbentuk tindakan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meraih kepentingan nasional negaranya (Rosenau, 1976: 18).

Selanjutnya, dalam *International Politics: A Framework for Analysis* K.J. Holsti menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang dapat menjadi pengaruh dari kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi,: 1. kebijakan mengenai keamanan, sosial dan ekonomi; 2. letak negara berdasarkan geografis; 3. struktur pemerintahan, tergantung pada bagaimana pemerintah membentuk kebijakan luar negeri sejalan dengan kepentingan nasionalnya; 4. birokrasi, mengacu pada proses pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri suatu negara; 5. atribut nasional, terkait dengan karakteristik negara seperti mayoritas jumlah penduduk, perkembangan ekonomi, dan aktivitas dalam komunitas internasional.

Sementara, faktor eksternal meliputi,: 1. dinamika sistem internasional, Struktur dan sistem internasional dapat menjadi pengaruh dari perumusan kebijakan luar negeri suatu negara; 2. struktur dari sistem ekonomi global; 3. respons atas tindakan dari aktor lain.; 4. masalah regional, di suatu kawasan jika terdapat masalah terhadap suatu negara, maka negara lain akan terdampak dari masalah tersebut (Holsti, 1997: 271-287).

2. Identitas

Dalam konteks Ilmu Hubungan Internasional, konsep identitas telah mendapat perhatian luas dari para konstruktivis, Parasarjana konstruktivis berargumen bahwa preferensi, kepentingan, dan struktur norma tidak dapat dipisahkan dari identitas para aktor, yang perlu dipertimbangkan secara serius untuk menjelaskan tindakan negara. Saat ini, konsep Identitas menjadi pusat dari agenda penelitian yang berusaha untuk bergerak di luar asumsi-asumsi rasionalis dan materialis dari tindakan negara (Bucher & Jasper, 2017: 392).

Alexander Wendt seorang tokoh dalam aliran Konstruktivisme, menggantikan dua karakteristik yang semakin umum prinsip Konstruktivisme. Ide-ide dapat menggantikan kekuatan yang bersifat material dalam menentukan struktur hubungan antar-manusia dan ide-ide tersebut dapat membangun identitas dan kepentingan para aktor yang memiliki persamaan tujuan (Wendt, 1999:1). Negara dapat memiliki banyak identitas yang dikonstruksi secara sosial melalui interaksi dengan aktor lain, identitas merupakan representasi pemahaman aktor mengenai siapa dirinya dan pada akhirnya menandakan kepentingan mereka. Identitas merupakan kepentingan dan tindakan, yang kemudian tindakan dari aktor harus selaras dengan identitasnya (Theys, 2018).

Identitas merupakan sebuah konstruksi yang menggambarkan dan menentukan bagaimana aktor harus berpikir, merasakan, mengevaluasi, dan pada akhirnya harus berperilaku dalam situasi yang relevan dengan kelompok. Proses perubahan identitas biasanya terjadi karena adanya interaksi sosial, melalui interaksi sosial para aktor menciptakan nilai, norma, kepercayaan, sikap, stereotip dan sebagai konsekuensinya mengubah psikologi aktor (Chafetz et al, 1998:8-10). Identitas dibangun berdasarkan kesamaan dan kesinambungan, identitas dapat dibangun secara sosial oleh agama, etnis, bahasa, wilayah, ras, dan kebangsaan (Harshe, 2006:3949).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-eksplanatif. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai cara untuk dapat mengeksplorasi dan memahami penjelasan yang dimiliki individu atau kelompok tentang isu-isu sosial (Creswell, 2014: 1-2). Penelitian deskriptif-eksplanatif menjelaskan dan mengidentifikasi sumber perilaku sosial, kepercayaan, kondisi, dan peristiwa (Neumann, 2014: 16). Penelitian ini menggunakan enam tahapan penelitian, yaitu mengidentifikasi masalah, melakukan tinjauan pustaka, menyederhanakan tujuan dan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data kualitatif, menganalisis data kualitatif, menulis laporan dan evaluasi penelitian (Creswell, 2012: 57). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari wawancara dari beberapa narasumber yang kredibel, yaitu A. A. Banyu Perwita yang merupakan Guru Besar di bidang Hubungan Internasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan juga pakar isu-isu politik luar negeri, A. M. Fachir, Wakil Menteri Luar Negeri RI tahun 2014-2019 serta Bagus Hendraning Kobarsiyah yang merupakan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI tahun 2020-2023. Selanjutnya, sumber data sekunder didapatkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menganalisis suatu sumber dalam bentuk buku, makalah, jurnal, artikel ataupun surat kabar, laman daring dari Kementerian Luar Negeri RI yang memiliki relevansi dan dapat mendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak era kemerdekaan, Islam dan kebijakan luar negeri Indonesia memiliki hubungan secara historis dan sosiologis. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aktor Islam di luar aktor negara, termasuk di dalamnya faktor penduduk dengan mayoritas muslim, gerakan intelektual Islam, dan organisasi masyarakat Islam (Alles dalam Umar, 2018).

Periode pasca-Reformasi 1998 telah memfasilitasi ruang baru untuk reartikulasi Islam di Indonesia dalam kebijakan luar negeri. Proses penggabungan ini bersifat dinamis menampilkan proses integrasi secara terbuka antara nilai-nilai Islam dan kebijakan luar negeri Indonesia. Proses demokratisasi setelah turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tahun 1998, meskipun masih terbatas, telah memungkinkan terjadinya reartikulasi ide-ide Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia, yang telah dimobilisasi untuk mewakili citra Indonesia dalam forum diplomatik dan politik internasional. Kebijakan luar negeri bukan hanya soal diplomasi atau keamanan yang dipimpin suatu negara, tapi juga soal agama dan budaya. Sejauh ini, penelitian Delphine Alles menempatkan Islam sebagai variabel penting dalam menjelaskan transformasi politik luar negeri Indonesia dari orientasi kebijakan yang relatif sekuler, yang hanya sedikit merujuk pada Islam dan identitas agama, menjadi identitas Islam moderat yang tergabung dalam demokratisasi internal (Alles dalam Umar, 2018).

Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan identitas Islam Moderat dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Perang Amerika Serikat di Afghanistan pada tahun 2002. Kasus ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri telah menyelesaikan dilema identitas. Kementerian Luar Negeri Indonesia dapat menggunakan simbol-simbol Islam untuk menjelaskan aktivitasnya di luar negeri. Islam Moderat yang diekspresikan dalam identitas dan norma-norma sipil yang universal dan inklusif. Hal ini memiliki implikasi yang luas untuk memahami peran Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia pasca-Reformasi 1998. Islam tidak hanya berperan sebagai pembatas, namun juga menjadi justifikasi atau legitimasi atas kebijakan luar negeri Indonesia (Salim, 2020).

Islam di Indonesia umumnya dianggap moderat dan toleran dibandingkan dengan Islam di Timur Tengah yang kaku. Islam di Indonesia juga memiliki ciri-ciri tertentu yang banyak sejalan dengan prinsip mengenai pluralitas, demokrasi, dan modernitas. Hal ini yang coba digunakan oleh Kemlu RI sebagai identitas internasional Indonesia. Identitas baru sebagai negara demokratis dan Islam Moderat. Identitas ini dimulai pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang memenangkan pilpres tahun 2004. Dalam pidato mengenai kebijakan luar negeri pertamanya, SBY memperkenalkan metafora "*menavigasi lautan yang bergejolak*" untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya identitas internasional Indonesia sebagai negara demokrasi, Islam, dan modernitas berjalan beriringan. Pidato presiden tersebut menjadi landasan pertama transformasi identitas nasional Indonesia dalam pembentukan citra internasional (Nugraha, 2012).

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia rutin mengadakan pemilu setiap lima tahun sekali. Pemilu merupakan bagian dari proses dan hasil dari sistem demokrasi sekaligus sebuah cara dalam melakukan pembaharuan konsensus sosial warga negara dan penciptaan lembaga negara yang demokratis. Hasil dari pemilu akan sangat berpengaruh terhadap arah dari pemerintahan selama lima tahun ke depan. Pemerintahan yang baik sesuai kehendak rakyat tidak terlepas dari keberhasilan dari penyelenggaraan pemilu (Budiyono, 2014: 284). Indonesia telah berhasil dalam menyelenggarakan Pilpres 2014. Hasil resmi perhitungan suara, KPU menetapkan pasangan Jokowi-JK menjadi pemenang dengan 53,15% suara. Partai yang mengusung pasangan Jokowi-JK adalah koalisi gabungan dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (KPU, 2014).

Sebagai seorang politisi, Jokowi dipersepsikan sebagai seorang abangan. Secara tradisi, abangan tidak menganut partai Islam di kancah politik, melainkan lebih condong ke partai nasionalis. Masyarakat abangan kurang menyukai bentuk-bentuk keagamaan karena sentimen keagamaan mereka dekat dengan budaya Jawa. Masyarakat abangan tidak menggunakan terminologi dan simbol-simbol agama untuk menarik simpati rakyat. pada aspek pendidikan, masyarakat abangan lebih tertarik menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah milik pemerintah dibandingkan pendidikan pesantren yang dibanggakan kelompok santri (Zaman, 2020: 97). Oleh karena itu, pada Pilpres 2014, Joko Widodo memilih Jusuf Kalla sebagai wakil presidennya. Hal ini disebabkan karena sebagai seorang politisi PDIP yang mewakili kelompok nasionalis, Jokowi memilih Jusuf Kalla untuk mendapatkan lebih banyak suara dari kawasan Indonesia Timur dan beberapa basis Golkar. Jokowi mendapat dukungan dari mayoritas warga NU. Hal ini disebabkan karena Jusuf Kalla dikenal sebagai politisi senior dari Golkar yang memiliki relasi cukup dekat dengan kelompok Islam seperti Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAHMI), NU, dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) (Karim, 2019:18).

Cukup menarik ditinjau dari perspektif latar belakang politik Jokowi yang nasionalis, jika dikaitkan dengan faktor Islam sebagai determinan berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam visinya sebagai calon Presiden Indonesia, Jokowi telah mengatakan akan mereposisi peran Indonesia dalam urusan global, dan dalam implementasinya pada periode pertama Presiden Jokowi, Indonesia cukup aktif berperan dalam kepemimpinan di dunia Islam. Bahkan, dalam debat Capres 2014, Jokowi secara eksplisit mengatakan, bahwa ia akan berjuang untuk mendorong kemerdekaan Palestina (RI, 2016).

Lebih lanjut, Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri RI 2015-2019 menguraikan prioritas politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Rencana strategis tersebut menyatakan, bahwa kepentingan nasional menjadi landasan dalam polugri Indonesia yang bebas dan aktif. Hal ini bertujuan untuk memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim, memperkuat posisi Indonesia dalam menangani isu-isu global, dan mewujudkan dunia yang damai dan adil di berbagai aspek kehidupan (Renstra Kementerian Luar Negeri Indonesia 2015-2020: 37).

Oleh karena itu, Kebijakan Luar Negeri Indonesia mempunyai visi strategis yang secara garis besar dituangkan dalam tiga prioritas utama: isu maritim dan keamanan, diplomasi ekonomi, dan perlindungan WNI di luar negeri. Untuk mencapai visi strategis tersebut, Kemlu membuat arah kebijakan dan strategi antara lain, (1) Mencoba untuk meningkatkan kesiapan domestik, serta peran Indonesia di ASEAN, (2) Memperkuat diplomasi maritim, serta percepatan penyelesaian terhadap masalah perbatasan, (3) Peningkatan terhadap peran Indonesia di tingkat global, (4) Indonesia menjadikan forum bilateral, multilateral, regional dan global untuk memperkuat diplomasi ekonomi, (5) Peningkatan terhadap kerja sama selatan-selatan dan triangular, (6) Mempromosikan serta meningkatkan kemajuan demokrasi dan HAM, (7) Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap WNI/BHI di luar negeri, (8) Menata kebijakan dan infrastruktur diplomasi Indonesia (Renstra Kementerian Luar Negeri Indonesia 2015-2020: 46-48).

Selanjutnya, dalam bagian ini penulis menganalisis faktor-faktor yang dijelaskan oleh Holsti, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut mencakup faktor internal, atribut nasional suatu negara. Sedangkan faktor eksternal, respons dari tindakan aktor lain. Kemudian faktor-faktor tersebut akan dielaborasi dengan Konsep Identitas karena dukungan Indonesia terhadap Palestina berkaitan dengan faktor persamaan identitas, yaitu Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari faktor internal yaitu, pengaruh ormas Islam di Indonesia, pengaruh solidaritas Indonesia sebagai negara sesama muslim, dan faktor eksternal, yaitu pengaruh OKI dan PBB terkait dukungan Indonesia terhadap Palestina di forum Internasional dan respon Indonesia terhadap pemindahan secara sepikah Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat. Hal ini akan dijelaskan untuk membuktikan bahwa faktor Islam dalam

kondisi tertentu dapat berpengaruh, terutama dalam konteks dukungan Indonesia terhadap Palestina.

Faktor Internal

1. Pengaruh Ormas Islam di Indonesia

Ada aktor-aktor yang berasosiasi dengan Islam di Indonesia yang dipersepsikan dapat memengaruhi kebijakan luar negeri. Salah satunya adalah ormas Islam. Organisasi-organisasi sosial yang keberadaannya diakui dan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai dua organisasi Islam tertua di Indonesia (Umar serta Alles, dalam Tamimi, 2025).

Dukungan ormas Islam terhadap Indonesia sebenarnya bukan fenomena baru. Akar gerakannya sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan yang ditandai dengan keikutsertaan ormas Islam. Muhammadiyah dan NU sudah lama turut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan bersama-sama menciptakan rumusan Pancasila dan NKRI berdasarkan UUD 1945 (RI, 2016:423).

Ormas Islam di Indonesia memiliki peran yang begitu kuat. Sebagai *civil society* ormas Islam telah memiliki peran penting bagi kemerdekaan Indonesia. Saat ini pengaruh ormas Islam di Indonesia meliputi di bidang sosial, politik, pendidikan, budaya, dan bahkan dalam menjaga perdamaian dunia. Muhammadiyah dan NU merupakan dua ormas Islam terbesar di Indonesia. Usia dari ormas tersebut jauh lebih lama daripada umur Indonesia dan sudah terbukti dapat melintasi zaman. Muhammadiyah didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912 dan NU oleh K. H. Hasyim Asy'ari di Jawa Timur pada tahun 1926. Kedua organisasi ini memiliki peran yang sangat strategis mengingat kemampuan dalam berdakwah dan merespons tantangan yang dihadapi oleh umat Islam, menjadikannya masih tetap eksis sampai sekarang (Astuti & Wibisono, 2022).

Muhammadiyah dan NU telah menyebarluaskan dakwah Islam yang *rahmatan lil alamin*. Muhammadiyah adalah lembaga yang sangat maju dalam mengelola lembaga-lembaga keislaman dalam pelayanan umum, seperti klinik, rumah sakit, dan pendidikan. Sedangkan NU dengan pesantrennya terbukti dapat menghadirkan kader-kader da. i yang dapat diterima oleh semua kelompok karena komunikatif, moderat, dan tidak kaku sesuai dengan koridor yang jelas. Indonesia mempunyai dua lembaga yang kuat di bidang keislaman yang tidak membahayakan bagi agama lain, bahkan memberikan manfaat. Oleh karena itu, sampai kapanpun ormas Islam, baik Muhammadiyah maupun NU akan tetap diperlukan dan memiliki peran yang sangat strategis dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dalam hubungan luar negeri Indonesia (Kobarsih, 2024).

Keterkaitan ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia merupakan konsekuensi secara sosiologis dari mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Muhammadiyah dan NU merupakan dua jangkar keagamaan yang harus dikawal. Oleh karena itu, dengan segala kelemahan dan kelebihannya, Muhammadiyah dan NU terbukti sangat kontributif terhadap pencapaian kemerdekaan Indonesia (Kobarsih, 2024).

Muhammadiyah dan NU telah banyak melahirkan tokoh penting perubahan bangsa. Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari berkontribusi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, K. H. Wahid Hasyim, Ki Bagoes Hadikusumo yang menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ikut dalam merumuskan ideologi negara (Pancasila). Demikian pula, Abdurrahman Wahid sebagai Presiden ke-4 Indonesia, tidak hanya dikenal baik di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Tokoh-tokoh lain dari Muhammadiyah dan NU sampai saat ini terus bermunculan yang kemudian menjadi tokoh berpengaruh baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya (Kobarsih, 2024).

Di tengah konflik yang melanda dunia, terutama yang terjadi di negara-negara Islam di

Timur Tengah, Muhammadiyah dan NU telah berhasil berkontribusi dalam menampilkan wajah Islam Indonesia yang toleran. Islam di Indonesia dapat berjalan beriringan dengan pembangunan demokrasi dan perdamaian. Hal ini berasal dari kontribusi besar kedua ormas dalam menyatukan Indonesia karena memiliki kesamaan visi dalam isu demokrasi dan kemanusiaan (VOA Indonesia, 2019). Muhammadiyah dan NU telah berjuang dalam proses yang panjang untuk kemerdekaan Indonesia, menjaga sekaligus membuat demokrasi selaras dengan tujuan beragama, sehingga Islam di Indonesia dikenal sebagai Islam yang moderat dan memainkan peran signifikan sebagai aktor dalam upaya menjaga perdamaian dunia.

Wamenlu Indonesia tahun 2014-2019, A.M. Fachir mengatakan, NU dan Muhammadiyah berperan penting dalam demokrasi dan pembangunan perdamaian di Indonesia dan keduanya juga terlibat aktif dalam membangun perdamaian dunia (UGM, 2019). Dalam upaya menjaga perdamaian dunia, NU telah berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan melalui pengiriman delegasi para kyai NU datang ke Afghanistan untuk berdialog, berdiskusi, dan saling memberi pemahaman mengenai pentingnya perdamaian. NU memberikan ide mengenai perdamaian dan hidup berdampingan antara agama dan negara yang merupakan bagian dari keislaman dan kebangsaan. Proses tersebut berlangsung hingga kini dan upaya ini berlangsung dengan dukungan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kompas, 2019).

Dalam menjalankan diplomasi, NU memprakarsai *International Conference of Islamic Scholar* (ICIS). Dalam forum ini dibahas langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan konflik di sejumlah negara muslim, termasuk Palestina (Fachir, 2024). Pada tahun 2015, Indonesia menyelenggarakan International Conference of Islamic Scholars (ICIS) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim - Malang. Konferensi ini diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Luar Negeri Indonesia, Panitia ICIS, dan UIN Malang. Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI saat itu Esti Andayani, konferensi ini diselenggarakan sebagai respons terhadap situasi dunia Islam yang masih diwarnai oleh ekstremisme, terorisme, konflik internal, dan krisis multidimensional yang berdampak pada tatanan dunia (Antara News, 2015). Sementara itu, menurut A. M. Fachir, ICIS diselenggarakan dan diprakarsai oleh NU sebagai forum untuk membahas mengenai isu-isu berkaitan dengan Palestina (Fachir, 2024).

Dalam konteks bantuan kemanusiaan, NU menggagas seruan yang meminta seluruh elemen bangsa mengambil sikap tegas terhadap perilaku Israel. NU menyerukan umat Islam untuk bekerja sama dengan rakyat Palestina dalam perjuangan melindungi agama dan kemerdekaan tanah air mereka dari kekerasan kaum penjajah Zionis. Gerakan perlawanan juga dilakukan melalui kegiatan penggalangan dana, seperti "*Palestinian Fund*" untuk meringankan beban perjuangan dan penderitaan rakyat Palestina. Lain daripada itu, NU juga memiliki lembaga NU Care-LAZISNU. Salah satu programnya, yaitu "*Peduli Palestina*" telah bersama perjuangan Palestina dari tahun 2014. LAZISNU mewadahi bantuan kemanusiaan dari nahdliyin dan telah tersalurkan dalam bentuk bantuan kepada rakyat Palestina. Pada tahun 2014 dan 2017, LAZISNU menyalurkan bantuan obat-obatan dan makanan serta melakukan kerja sama dengan Kedubes Palestina di Jakarta (NU Online, 2024). Selain itu, "*Gerakan Pekan Rajabiyah*" juga dilakukan melalui cabang-cabang NU di seluruh Indonesia. Gerakan tersebut berdasarkan arahan Pengurus Besar NU untuk memperingati "*Pekan Rajabiyah*" setiap tanggal 27 bulan Rajab, seiring dengan perayaan Isra Miraj Nabi Muhammad Saw. yang dipadukan dengan solidaritas perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka. Hingga saat ini, para ulama pesantren terus mendorong pemerintah Indonesia untuk mengupayakan kedaulatan bagi Palestina di tengah pendudukan, aneksasi, dan blokade Israel. Kedaulatan diraih rakyat Palestina di forum PBB, namun hal ini tidak sama seperti situasi di lapangan, di mana rakyat Palestina masih berjuang untuk memperoleh kedaulatan negaranya (NU, 2021).

Sementara itu, Muhammadiyah juga mempunyai peran penting dalam komitmennya

untuk menjaga perdamaian dunia. Muhammadiyah membantu dalam resolusi konflik di Mindanao, Filipina Selatan. Muhammadiyah memprakarsai adanya perdamaian di kawasan Mindanao terkait dengan aksi kelompok separatis Abu Sayyaf. Di Thailand Selatan, Muhammadiyah menggunakan pendekatan *soft-power* melalui jalur dakwah dan perdamaian serta untuk menciptakan stabilitas di kawasan (Kompas, 2019).

Dalam pelaksanaan diplomasi, Muhammadiyah memprakarsai *World Peace Forum* (WPF) bersama dengan *Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations* (CDCC) yang merupakan forum yang sering dihadiri oleh aktivis nasional maupun internasional telah menjadi ruang untuk menyampaikan gagasan tentang perdamaian dunia (Fachir, 2024). Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tahun 2010-2015 Din Syamsuddin mengatakan, WPF diselenggarakan sebagai forum antaragama dan bersifat interdisipliner. WPF terbuka bagi para ulama, aktivis, politisi, dan tokoh agama dari berbagai negara. Dalam forum ini diupayakan pencapaian perdamaian dunia dan berbagi pengalaman dalam menangani konflik (Republika, 2016). Hampir di setiap pertemuan dari WPF membahas mengenai isu Palestina, misalnya WPF ke-7 yang diadakan di Jakarta pada tahun 2018. Pada saat itu WPF mengangkat tema “*The Middle Path for The World Civilization*”. Pada acara yang dihadiri tokoh agama dari 43 negara, Menlu Indonesia Retno Marsudi menekankan bahwa konflik global masih terus terjadi. Terutama di Palestina, masyarakat masih menderita akibat agresi yang dilakukan oleh Israel. Hal ini menunjukkan bahwa fokus dari diadakan forum ini adalah membahas mengenai isu-isu di dunia Islam dan berdiskusi untuk menangani masalah tersebut (Fachir, 2024).

Lebih lanjut, atas dukungannya terhadap Palestina, pada tahun 2014 PP Muhammadiyah menyerahkan dana bantuan kemanusiaan sebesar 2,5 miliar rupiah kepada masyarakat Palestina. Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan oleh Din Syamsuddin di dalam gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah dan diterima oleh Fariz Mehdawi, Dubes Palestina untuk Indonesia. Acara ini juga dihadiri oleh para dubes dari Timur Tengah, perwakilan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan perwakilan ormas Islam Indonesia (Kompas, 2014). Din Syamsuddin mengatakan, bantuan kemanusiaan ke Palestina tidak hanya diberikan saat itu saja, tetapi juga telah dikumpulkan sebelumnya. Bantuan disalurkan melalui tiga jalur. Salah satunya adalah jalur yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari cabang Muhammadiyah melalui kotak sumbangan. Melalui lembaga informasi dan amil zakat Muhammadiyah LazisMu yang mampu mengumpulkan dana hingga satu setengah miliar rupiah. Jalur terakhir adalah Badan Penanggulangan Bencana Muhammadiyah atau *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC). Dubes Palestina Fariz Mehdawi dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih atas nama rakyat Palestina atas persatuan bangsa Indonesia. Menurutnya solidaritas ini menunjukkan bahwa Palestina tidak sendirian dalam menghadapi konflik dengan Israel (Kompas, 2014).

Peranan penting Muhammadiyah dan NU dalam WPF dan ICIS menunjukkan, bahwa adanya kerja sama antara ormas Islam dan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ini menjadi penting karena kiprah Muhammadiyah dan NU yang panjang dan ekstensif dalam diplomasi kebudayaannya merupakan pelengkap diplomasi yang dijalankan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini diplomasi resmi pemerintah dan diplomasi melalui ormas (*second track diplomacy*) harus berjalan bersama dan saling melengkapi. Muhammadiyah dan NU sebagai ormas Islam memiliki pengaruh dan peran tersendiri dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini dikarenakan secara historis kedua ormas Islam ini telah banyak berkontribusi pada kemerdekaan Indonesia yang kemudian peran dan pengaruhnya tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan negara, baik di bidang sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Hal ini yang menjadikan Muhammadiyah dan NU juga memiliki peran dan pengaruh terhadap implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam konteks dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Sebagai aktor nonnegara, Muhammadiyah dan NU mempunyai pengaruh dalam menyuarakan isu Palestina, baik melalui

Kementerian Luar Negeri Indonesia maupun melalui forum yang diprakarsai oleh kedua ormas tersebut, seperti dalam WPF dan ICIS.

2. Pengaruh Solidaritas Indonesia terhadap Palestina sebagai Negara Muslim

Fakta telah menunjukkan, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Ini yang kemudian menjadi salah satu fokus Indonesia untuk membela negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim lainnya yang masih tertindas yang salah satu contohnya adalah dukungan Indonesia terhadap Palestina. Cita-cita nasional Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ikut serta dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia, telah menjadi landasan utama dalam formulasi politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Tujuan Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia merupakan tujuan yang bersifat eksternal. Meskipun demikian, politik luar negeri harus mendukung dua tujuan, tujuan yang bersifat internal dan eksternal. Sebab, hanya dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bangsa Indonesia dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Lebih jauh lagi, terwujudnya seluruh cita-cita tersebut akan menjadikan tujuan kemerdekaan dan terwujudnya negara serta kedaulatan bangsa Indonesia (Situmorang, 2015: 70).

Dalam konteks menjaga perdamaian dan ketertiban dunia, isu Palestina menjadi fokus Indonesia. Isu Palestina terkait dengan isu keadilan, kemanusian, kemerdekaan, dan hak asasi manusia. Dari Pembukaan UUD 1945 tersirat bahwa selama ada bangsa yang belum merdeka, maka Indonesia akan ikut memperjuangkan kemerdekaannya. Ini merupakan amanat konstitusi, terutama pada Alinea keempat yang menyebutkan untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan”. Indonesia memiliki landasan konstitusional yang jelas. Oleh karena itu, pada tahun 1955 salah satu implementasi amanat konstitusi adalah pelaksanaan KAA di Bandung (Fachir, 2024). Dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan jantung politik Indonesia. Indonesia tidak akan berhenti berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Indonesia menginginkan penghentian kekerasan, *humanitarian assistance*, fokus pada kemerdekaan Palestina, dan menjamin hadirnya *international present* untuk mencegah kekerasan di Palestina (Kobarsih, 2024).

Ada dinamika dalam menggasosiasikan dukungan Indonesia terhadap Palestina, yaitu apakah murni karena amanat konstitusi atau ada faktor sentimen Islam yang kemudian memengaruhi *mindset* penyusun kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam konteks dukungan Indonesia terhadap Palestina. Secara historis Indonesia melakukan dukungan terhadap Palestina karena amanat UUD 1945 dan kesamaan nasib yang dimiliki oleh Indonesia dengan Palestina sebagai negara bekas kolonialisme.

Indonesia belum pernah secara langsung menggunakan faktor Islam dalam kebijakan luar negerinya, terkait dukungan Indonesia terhadap Palestina. Dukungan tersebut selalu didasarkan pada konteks Pembukaan UUD 1945, terutama pada prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Tetapi masyarakat Indonesia mengasosiasikan dukungannya terhadap Palestina berdasarkan agama yang biasanya digunakan oleh unsur-unsur pribadi kelompok tertentu, seperti dari Muhammadiyah dan NU. Hal ini merupakan suatu kewajaran karena keadaan sosiokultural masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Dalam hal ini ada perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah dan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Pemerintah selalu menyandarkan dukungannya pada amanat konstitusi karena faktor Islam adalah sekunder bukan primer. Akan tetapi, karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam maka sangat wajar jika ada klaim bahwa dukungan Indonesia kepada Palestina dikaitkan dengan faktor Islam (Perwita, 2024).

Dengan kondisi tersebut, dinamika terkait Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia selalu menjadi perbincangan. Dalam kondisi tertentu faktor Islam dapat memainkan peran penting dalam dukungan Indonesia terhadap Palestina. Tidak dapat dipungkiri Islam menjadi salah salah satu faktor yang dapat memengaruhi dukungan Indonesia terhadap Palestina. Hal

ini karena isu Palestina merupakan portofolio dan menjadi fokus bagi para aktivis Islam di Indonesia, seperti mahasiswa, dosen, masyarakat atau ormas Islam seperti Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan bentuk dari solidaritas bangsa Indonesia sebagai negara mayoritas muslim dan negara bekas kolonial. Hal ini juga sekaligus menjadi suatu kewajiban bagi seluruh umat manusia dalam perjuangan *to stop the violence, to respect human right, to stop human right abuses* (Kobarsih, 2024).

Walaupun bukan isu agama, tetapi secara tidak langsung isu Palestina memiliki dimensi keagamaannya, misalnya karena di sana terdapat tempat-tempat suci bagi orang-orang beragama samawi (Islam, Nasrani, dan Yahudi). Zionisme Israel mendasarkan klaimnya terhadap tanah Palestina berdasarkan pesan-pesan keagamaan, selain itu dukungan kelompok-kelompok ultranasionalis atau ultrareligius orang-orang yahudi kepada Netanyahu, seperti Bezalel Smotrich dan Ben Gvir selalu mendasarkan tuntutan pada pesan kitab suci mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tuntutan datang pada kelompok Islam radikal, seperti Hamas atau Jihad Islam (Kobarsih, 2024).

Yerusalem merupakan tanah wakaf orang Islam dan di sana terdapat Mesjid Aqsa yang pernah menjadi kiblat bagi umat muslim, dibakar dan dihancurkan. Sangat wajar saja jika umat Islam marah akan hal tersebut. Perjuangan di Palestina bukan hanya sekedar perjuangan orang-orang Islam atau orang-orang Palestina. Tetapi, perjuangan orang-orang di seluruh dunia seharusnya berada di atas nama kemanusiaan. Pada dasarnya untuk membela Palestina tidak perlu menjadi orang Islam, cukup menjadi manusia yang mempunyai hati nurani untuk membela Palestina (Kobarsih, 2024).

Dimensi dan nuansa nilai-nilai agama sangat kental dalam isu Palestina. Agama telah mendukung nilai-nilai seperti nilai keadilan, nilai kemerdekaan, nilai kemanusiaan. Apalagi memang ada kesamaan antara mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dengan di Palestina. Ini yang menjadikan adanya solidaritas persaudaraan seagama sangat kental. Oleh karena itu, Indonesia mendukung Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya secara mutlak (Fachir, 2024). Siapapun yang menjadi Presiden Indonesia, tidak akan keluar dari amanat konstitusi. Jika konstitusi sudah jelas memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina, maka Presiden Indonesia atas nama negara dan rakyat Indonesia harus mendukung kemerdekaan Palestina. Adanya faktor solidaritas seagama itu juga tidak dapat dinafikan. Adanya fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu adalah muslim, maka pasti akan memiliki ikatan atau dukungan emosional terhadap sesama muslim lainnya, apalagi terhadap muslim lain yang terjajah atau tertindas. Oleh karena itu, faktor ini dapat menjadi pengaruh dalam dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina (Fachir, 2024).

Dalam konteks ini ada dua hal penting yang mana pemerintah Indonesia jelas mempunyai posisi sesuai amanat konstitusi dan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ikut bergerak sehingga dukungan rakyat punya pengaruh besar terhadap dukungan Indonesia terhadap Palestina. Sangat jarang melihat posisi pemerintah Indonesia dalam isu internasional yang mendapatkan dukungan begitu besar dari rakyat kecuali untuk isu Palestina. Jika dibandingkan dengan isu Ukraina, pemerintah Indonesia mengecam Rusia tetapi rakyatnya tidak terlalu peduli terhadap kecaman tersebut. Oleh karena itu, ada perbedaan sikap atau respons masyarakat antara isu Palestina dengan isu Ukraina. Hal ini dapat dilihat sebagai seberapa besar pengaruh faktor Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Satu-satunya isu global yang menyangkut masalah keadilan, kemerdekaan, dan kemanusiaan yang secara jelas didukung oleh rakyat Indonesia adalah isu Palestina. Hal ini ditampilkan dalam bentuk unjuk rasa atau dalam bentuk penggalangan dukungan dana untuk Palestina. Hal ini tidak dilakukan untuk isu-isu lain dan untuk negara lain (Fachir, 2024). Lebih lanjut, dalam konteks solidaritas Indonesia terhadap Palestina terdapat dua bentuk dukungan Indonesia yaitu dalam bentuk dukungan politik dan dukungan kemanusiaan. Dukungan ini menunjukkan bahwa sangat

nampak dukungan rakyat terhadap isu Palestina ketimbang terhadap isu lain (Fachir, 2024).

Konflik di Palestina memiliki pengaruh yang kuat terutama dalam konteks opini publik dan solidaritas rakyat Indonesia. Dukungan rakyat Indonesia seringkali diadakan dalam bentuk demonstrasi atau aksi solidaritas membela Palestina yang sering kali diadakan di berbagai kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan dukungan yang kuat dari masyarakat sipil terhadap rakyat Palestina. Liputan pemberitaan media massa yang luas terkait penderitaan rakyat Palestina dapat memicu reaksi emosional rakyat Indonesia, sehingga memengaruhi persepsi terkait konflik tersebut. Sering kali rakyat Indonesia bersympati kepada rakyat Palestina dan mengemukakan simpati ini dalam aksi solidaritas yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mendukung hak-hak Palestina dan mendorong penyelesaian konflik secara damai. Bahkan, gerakan solidaritas terhadap Palestina dilakukan dari tingkat daerah hingga nasional. Pada tahun 2017, ribuan masyarakat sipil Indonesia berkumpul di Monumen Nasional sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Dalam perhelatan tersebut, rakyat Indonesia menyuarakan desakan kepada AS untuk membatalkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel (BBC, 2017). Pada tahun 2018 di Bandung, pada saat Menlu Palestina mengunjungi Indonesia, Kemenlu RI mengadakan acara khusus, yaitu "Pekan Solidaritas untuk Palestina". Menlu RI bersama Menlu Palestina juga meresmikan *Palestine Walk: Road to Freedom* berupa taman-jalan sepanjang 100 meter di Alun-alun Kota Bandung. *Palestine Walk* menggambarkan dukungan dan komitmen masyarakat Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina (Tempo, 2018). Di tahun yang sama, ratusan Muslim Indonesia menggelar aksi solidaritas terhadap Palestina di depan kantor Kedutaan Besar AS di Jakarta. Hal ini dilakukan karena tindakan kekerasan Israel terhadap demonstran *Great Return March* (GRM) di Jalur Gaza. Masa demonstrasi juga membawa spanduk pro-Palestina dan mengibarkan bendera Palestina dan Indonesia di depan kantor Kedubes (Idrus, 2018).

Dukungan rakyat Indonesia terhadap Palestina merupakan bentuk dari sebuah rasa solidaritas karena memiliki persamaan agama, yaitu Islam. Dukungan ini juga berdasarkan solidaritas antara negara bekas kolonialisme. Secara historis Indonesia dan Palestina memiliki hubungan yang baik, Palestina menjadi salah satu bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara *de facto*. Oleh karena itu, secara tidak langsung Indonesia harus membela kebaikan Palestina di masa lalu. Dukungan Indonesia juga berdasarkan amanat konstitusi yang relevan dengan nilai-nilai Islam karena tidak ada ajaran agama manapun yang mengajarkan penjajahan, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap warga sipil.

Faktor Eksternal

1. Pengaruh OKI dan PBB terkait Dukungan Indonesia terhadap Palestina

Dalam konteks dukungan politik Indonesia kepada Palestina, Indonesia aktif menyuarakan isu mengenai Palestina di forum internasional. Kementerian Luar Negeri melalui Menlu Retno Marsudi sudah sangat optimal, tampil dan berbicara di berbagai forum baik di OKI dan PBB. Dalam pertemuan bilateral dan multilateral, Indonesia selalu memasukkan aspek terkait Palestina. Dengan segala keterbatasan Indonesia sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan dan menyuarakan isu Palestina. Hal ini disampaikan, terutama oleh Dubes Palestina di Indonesia yang mengatakan, "Menlu Indonesia Retno Marsudi lebih Palestina daripada saya." Dasarnya adalah ketegasan Indonesia dalam menyampaikan aspirasi terhadap kemerdekaan Palestina di forum Internasional (Kobarsih, 2024).

a. OKI dan Dukungan Indonesia terhadap Palestina

Faktor eksternal yang dapat memengaruhi dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah keberadaan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). OKI didirikan oleh umat Islam dan untuk kemaslahatan umat Islam di seluruh dunia. OKI merupakan organisasi yang didirikan berdasarkan suara kolektif dunia Islam. OKI berupaya menjaga dan melindungi kepentingan dunia Islam dengan semangat memajukan perdamaian dan keharmonisan antara bangsa (OIC,

History). Pada *the Third Islamic Conference* di Yerusalem tahun 1931, berkumpullah para intelektual muslim di seluruh dunia. Kemudian pada konferensi pertama para pemimpin politik dunia Islam pada bulan Agustus 1954 dirancang sebuah undang-undang yang akhirnya disetujui untuk tujuan terbentuknya organisasi Islam yang bersifat universal. Terakhir, pada *the Islamic Summit Conference* yang diselenggarakan di Rabat pada tahun 1969 yang menyetujui “*Deklarasi Rabat*” yang menekankan pada keyakinan terhadap agama Islam, hak asasi manusia, dan Piagam PBB. Konferensi Rabat diadakan oleh negara-negara Islam untuk merespons pembakaran yang dilakukan Israel terhadap Masjid Aqsa di Yerusalem pada tanggal 21 Agustus 1969 (Castillo dan Angelez, 2015: 171-172).

Hasil dari konferensi ini adalah ekspresi solidaritas negara-negara OKI kepada rakyat Palestina dan komitmen negara-negara OKI untuk membina kerja sama ekonomi, budaya, dan agama yang saling menguntungkan. Untuk mendiskusikan masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan dunia Islam, pada tanggal 23-25 Maret 1970, Raja Faisal dari Arab Saudi mengadakan Konferensi Menteri Luar Negeri Islam I di Jeddah, yang memutuskan mengambil langkah-langkah untuk kerja sama internasional dan menciptakan sebuah forum untuk berdiskusi mengenai topik-topik utama yang memengaruhi dunia Islam. Pada tahun 1972, Konferensi Menteri Luar Negeri Islam III menyetujui dan mengadopsi Piagam Organisasi Konferensi Islam, yang memunculkan sebuah organisasi baru yang memberikan penekanan khusus pada gagasan solidaritas Islam di seluruh dunia (Castillo dan Angelez, 2015: 173).

OKI saat ini beranggotakan 57 negara Islam atau negara yang mayoritas berpenduduk muslim. OKI mendapat kehormatan untuk menyatukan umat Islam menjadi satu organisasi terpadu yang dapat secara aktif mewakili umat Islam dalam merealisasikan tujuan mereka. Organisasi ini memiliki hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi antarpemerintah lainnya untuk melindungi kepentingan vital umat Islam dan mengadvokasi penyelesaian perselisihan yang melibatkan negara anggota. Demi menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, organisasi ini telah mengambil berbagai langkah untuk menghilangkan kesalahpahaman dan berkomitmen kuat untuk menghilangkan diskriminasi terhadap umat Islam (OIC, History).

Dalam merealisasikan tujuan umat Islam, terdapat Piagam OKI yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota OKI, termasuk Indonesia. Dalam piagam tersebut dijelaskan bahwa negara-negara anggota OKI memiliki tekad yang berpedoman pada nilai-nilai luhur Islam, yaitu persatuan dan persaudaraan. OKI juga menegaskan kembali pentingnya memajukan dan memperkuat persatuan dan kesatuan di antara negara-negara anggota untuk menjamin kepentingan bersama di tingkat internasional. Salah satu pasal yang secara langsung membahas mengenai Palestina terdapat pada *chapter I artikel I (8)* mengenai “*The objectives of the Organisation of Islamic Cooperation*” yang dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari OKI adalah mendukung dan memberdayakan rakyat Palestina untuk merdeka dan menjadi negara berdaulat dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibukotanya, dengan menjaga karakter Islam serta tempat-tempat suci agama Islam (Charter of OIC).

Dalam *OIC-2025 Program Actions*, Rencana Implementasi tahun 2016-2025, mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Syarif disebutkan bahwa *programs actions of implementations plan* OKI yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggotanya. Pertama, melakukan upaya-upaya untuk mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina yang dilakukan Israel sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur, sesuai dengan Resolusi DK-PBB, hukum internasional, Prinsip Madrid, Piagam PBB, dan Inisiatif Perdamaian Arab. Selain itu, melakukan tindakan di tingkat internasional untuk mencabut blokade Israel di Jalur Gaza. Kedua, mendukung dan memberdayakan rakyat Palestina untuk menggunakan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk kembali dan mendirikan negara Palestina yang merdeka, di perbatasan sebelum Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Ketiga, mendukung kota Al-Quds sebagai ibu kota negara Palestina, melestarikan warisan serta identitas Arab dan Islam, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan Kristen (The OIC-

2025 Programme Action).

Indonesia sebagai salah satu negara anggota OKI tentu akan menaati prinsi-prinsip dan aturan dari OKI. Implementasi dari dukungan Indonesia terhadap Palestina di OKI merupakan cerminan dari pengaruh OKI terhadap dukungan Indonesia kepada Palestina. Faktor solidaritas Islam menjadi sangat penting karena berdirinya OKI didasarkan pada sebuah rasa solidaritas negara-negara Islam terhadap Palestina dan ini yang kemudian menjadi prinsip dasar negara-negara OKI harus membantu negara lain sesama anggota OKI. Dalam implementasinya, Indonesia telah mengadopsi Piagam OKI dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Piagam Organisasi Kerja Sama Islam, setelah sebelumnya menandatangani Piagam OKI pada tanggal 18 Juni 2008 di Kampala, Uganda (Mensesneg, 2024). Pengadopsian Piagam OKI adalah untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional melalui keikutsertaannya dalam OKI untuk mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Mensesneg, 2024).

b. PBB dan Dukungan Indonesia terhadap Palestina

Secara historis, salah satu tujuan utama didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah menjaga perdamaian dunia dan menghentikan perang yang pada saat itu sedang terjadi. Jika konsepsi ini ditelusuri lebih jauh, maka terdapat persamaan prinsip antara Piagam PBB dan Al-Quran. Hal tersebut disampaikan oleh Quraish Shihab yang mengatakan, bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi umat muslim terutama dalam melaksanakan perannya di dunia, yaitu untuk membangun perdamaian dan harmonisasi. Menurutnya, prinsip ini sejalan dengan tujuan PBB, yaitu mewujudkan toleransi dan hidup berdampingan secara damai antarkelompok, agama, ras, suku, dan budaya yang berbeda (NU, 2023).

Al-Quran telah menjadi sumber hukum tertinggi dalam Islam. Al-Quran telah membuat aturan mengenai prinsip dasar dan norma yang mengatur hubungan antara negara. Prinsip dasar yang mengatur hubungan antara negara termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”.

Dalam kalimat *“Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal”* mengandung makna bahwa anjuran Islam bagi setiap bangsa atau umat manusia untuk melakukan interaksi satu sama lain. Agar terjalin hubungan yang harmonis, maka diperlukan aturan dan norma yang mengatur negara untuk bertindak sesuai norma yang berlaku (Wiradipradja, 2003). Islam memberikan pedoman mengenai hal ini dalam Surat Al-Maidah ayat 2.

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

Hal ini selaras dengan prinsip PBB dalam *Charter I Article 1 (1)*.

“To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace” (UN Charter).

Piagam PBB sebagai perjanjian internasional telah menjadi sumber hukum internasional.

Prinsip kesetaraan antarnegara dalam banyak hal merupakan landasan terpenting dalam hubungan internasional. Hal ini mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa atau agama merupakan pelanggaran hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia (Wiradipradja, 2003).

Perkembangan isu hak asasi manusia di dunia Barat adalah terkait dengan konsep hak asasi manusia yang muncul dari sejarah negara-negara Eropa dan diterapkan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948. Sementara itu, perkembangan isu hak asasi manusia di dunia Islam bermula dari sejarah peradaban Islam dan diterapkan pada *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (CDHRI) tahun 1990. Terdapat perbedaan konteks di mana konsep hak asasi manusia dikembangkan antara konsep hak asasi manusia yang berkembang di dunia Barat dengan konsep hak asasi manusia dalam Islam. Keduanya mempunyai prinsip yang sama dalam melindungi hak asasi manusia universal, sebagaimana dibuktikan dengan ketentuan UDHR dan CDHRI. Misalnya, Pasal 1 dan 2 UDHR dan Pasal 1 CDHRI mengatur persamaan martabat manusia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, Pasal 3 UDHR dan Pasal 2 (a) CDHRI berkaitan dengan hak untuk hidup, Pasal 7 UDHR dan Pasal 19 (a) CDHRI berbicara mengenai persamaan di depan hukum.

Piagam PBB termasuk dalam kategori *ijma* (kesepakatan) dunia internasional tentang suatu hal yang dilaksanakan secara bersama. Oleh karena itu, sangat lumrah jika Indonesia menjadikan fora di lingkungan PBB sebagai perantara dalam mendukung kemerdekaan Palestina, terlebih jika terdapat nilai-nilai ajaran Islam yang selaras dengan Piagam PBB, akan menambah pengaruh dan keyakinan Indonesia sebagai mayoritas penduduk muslim dalam menyuarakan dukungannya terhadap Palestina di PBB.

Analisis terhadap Konsep Identitas

Hal ini merujuk pada Konsep Identitas yang menyatakan, bahwa identitas merupakan sebuah konstruksi yang menggambarkan dan menentukan bagaimana aktor harus berpikir, merasakan, mengevaluasi, dan pada akhirnya harus berperilaku dalam situasi yang relevan dengan kelompok (Chafetz et al, 1998:8-10). Oleh karena itu, respons Indonesia terhadap pemindahan secara sepikah Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia sebagai entitas negara bertindak sesuai dengan kepentingan negara dengan identitas yang sama, yaitu Palestina.

1. Respons Indonesia terhadap Pemindahan secara Sepikah Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel oleh Amerika Serikat

Pemindahan Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara resmi diakui Amerika Serikat pada 6 Desember 2017. Presiden AS Donald Trump menganggap bahwa pemindahan ini bagian dari sebuah proses perdamaian Israel-Palestina dan agenda yang sejak lama tertunda. Menurutnya pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan sebuah kenyataan dan langkah yang harus dilakukan. Dimensi politik juga menjadi faktor penting dalam proses pemindahan ini karena pemindahan ini merupakan salah satu janji politik Presiden Trump ketika mencalonkan diri sebagai Presiden AS (The New York Times, 2017a). Dalam pidato resminya Presiden Trump menegaskan, bahwa ia mengambil keputusan ini dengan keyakinan bahwa proses realisasi perdamaian di Timur Tengah akan tercapai. Ia menekankan, bahwa langkah ini merupakan langkah tulus yang telah diambil oleh AS untuk menjaga perdamaian antara Palestina dan Israel. Harapannya adalah adanya kesepakatan yang terjadi dan berkelanjutan antara Palestina dan Israel. Lebih lanjut, Trump menyampaikan sebuah harapan agar Yerusalem tetap menjadi rumah ibadah bagi orang Yahudi, Kristen, dan Islam. Trump berusaha untuk menyatukan mereka dengan membujuk para pemimpin politik Israel, Palestina, Yahudi, Kristen, dan muslim untuk mau bekerja sama demi terciptanya perdamaian yang nyata. Di akhir pidatonya Presiden Trump mengucapkan doa dan terima kasih kepada Palestina, Israel,

dan AS (The New York Times, 2017b).

Namun setelah pernyataan Presiden Trump tersebut, muncul reaksi keras dari dunia internasional. Untuk merespons pernyataan tersebut, diadakan pertemuan darurat Majelis Umum PBB pada tanggal 21 Desember 2017 terhadap sikap dan posisi AS terkait pengakuan sepikah Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ada pelanggaran yang dilakukan AS dalam keputusannya terkait dengan pelanggaran terhadap resolusi DK-PBB mengenai status Yerusalem yang hanya dapat diselesaikan oleh Israel dan Palestina. Dalam sidang darurat tersebut sebanyak 128 negara menolak keputusan AS, sembilan negara mendukung, dan 35 negara memilih *abstain*. Banyaknya negara yang memilih menolak karena kekhawatiran mereka terhadap masalah *human security* di mana keputusan AS ini akan berpotensi menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius (UN Security Council Report, 2017).

Sidang darurat ini diadakan atas permintaan Palestina dengan dukungan beberapa negara. Dari adanya tuntutan yang diajukan sebagian besar negara pada sidang darurat MU-PBB, diharapkan semua pihak dapat mematuhi resolusi DK PBB terkait status Yerusalem. Oleh karena itu yang dilakukan oleh AS merupakan suatu pelanggaran karena tidak sesuai dengan ketentuan resolusi. Dalam konteks ini, posisi Indonesia menolak dengan tegas apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat. Hal ini disampaikan kepada 192 negara anggota PBB di New York oleh Dubes Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani melalui *Emergency Special Session* Majelis Umum PBB mengenai "*The Illegal Israel Actions in the Occupied East Yerusalem and the rest of the Occupied Palestinian People*". Indonesia menjadi salah satu *co-sponsor*. Dalam forum tersebut Dubes Dian mengatakan keputusan yang dilakukan Presiden Trump melukai perasaan umat Islam dan menjadi sinyal yang berbahaya bagi keamanan di Timur Tengah karena Yerusalem merupakan kota suci yang mendapatkan jaminan keamanan dari DK dan MU-PBB. Indonesia melakukan himbauan kepada dunia internasional agar menolak keputusan AS karena telah melanggar perjanjian internasional. Indonesia telah melakukan langkah diplomasi untuk mendukung perjuangan Palestina.

Keterlibatan Presiden dan Menlu Indonesia dalam diplomasi ini menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam mendukung Palestina di PBB (Liputan 6, 2017). Menlu Retno Marsudi dalam hal ini sangat prihatin dengan sikap Amerika Serikat. Menurutnya apa yang telah dilakukan oleh AS yang diklaim sebagai solusi perdamaian justru akan semakin mempersulit proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Hal ini dikarenakan perubahan status Yerusalem menjadi ibu kota telah melanggar resolusi DK-PBB. Selanjutnya, dalam konteks ini perlu adanya kebijaksanaan dari AS dalam mengambil keputusan terkait pemindahan ibu kota Yerusalem ke Israel (VOA Indonesia, 2017). Indonesia telah melakukan kecaman keras terhadap AS. Hal tersebut dikatakan oleh Menlu Retno Marsudi dalam *Bali Democracy Forum* dengan menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi, Amerika Serikat seharusnya mengerti apa yang dimaksud dengan demokrasi. Indonesia menegaskan akan terus selalu ada dengan rakyat Palestina untuk mendukung hak-hak mereka yang dirampas oleh Israel (Kominfo. 2017).

Kecaman Indonesia juga disampaikan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mendesak AS untuk meninjau ulang keputusannya karena telah mencederai Resolusi DK dan MU-PBB dan dapat merusak stabilitas di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan pada Kamis, 7 Desember 2017, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Terkait tindak lanjut dari pernyataan tersebut, Indonesia dengan cepat menjalin komunikasi dengan negara-negara anggota OKI dan melakukan pertemuan khusus untuk membahas masalah tersebut. Selain itu, Indonesia juga telah mengusulkan kepada negara-negara OKI untuk mendesak PBB agar segera melakukan sidang dalam menyikapi pengakuan sepikah Amerika Serikat (Mensesneg, 2017b).

Dalam masalah ini, posisi pemerintah Indonesia mendukung solusi dua negara (*two-states solution*) dan mendukung kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Indonesia tidak akan memberikan dukungan kepada negara-negara yang tidak sesuai

dengan posisi tersebut. Terciptanya perdamaian antara Palestina dan Israel harus dengan adanya solusi dua negara dan Indonesia menyatakan tidak sependapat dengan sikap AS dalam melakukan klaim sepihak terhadap pemindahan Yerusalem sebagai ibu kota Israel (Fachir, 2024).

Dengan mengecam perbuatan AS, Indonesia dinilai sudah melakukan hal yang tepat mengingat status Yerusalem yang masih bermasalah. Seharusnya Yerusalem menjadi pusat agama bukan menjadi ibu kota karena yang menjadi persoalan adalah lokasinya antara di Gaza atau *West Bank*. Dalam konteks ini Israel tidak hanya memancing reaksi ketika menggunakan simbol Yerusalem. Israel sebenarnya ingin mengoyak persaudaraan negara-negara muslim. Oleh karena itu negara-negara muslim seharusnya jangan terpancing dan terpecah belah (Perwita, 2024).

Lebih lanjut, sikap yang dilakukan oleh AS bertentangan dengan kesepakatan internasional. Yerusalem disepakati sebagai wilayah yang istimewa dan dikhawatirkan jika AS bersikeras dengan sikap ini akan menghambat bahkan mempersulit proses perdamaian di Timur Tengah karena klaim sepihak yang dilakukan oleh AS tidak dapat diterima mengingat penetapan ibu kota masih dalam proses dialog. Jika hal ini dipaksakan oleh AS, maka akan menjadi beban sekaligus menjadi sumber ketegangan baru dan tidak akan berkontribusi secara positif terhadap masa depan Palestina (Kobarsyih, 2024). Dalam kondisi sekarang AS memiliki sifat yang mendua dalam menanggapi tekanan. Kredibilitas AS semakin menurun, dianggap tidak peka, dan tidak menghormati proses HAM dan kemerdekaan. Sikap yang ditunjukkan AS sangat ironis mengingat AS selalu mempromosikan dirinya sebagai pembela kebebasan dan kemerdekaan dan menjadi simbol bagi bangsa yang ingin meraih kemerdekaannya. Tetapi, dengan hal ini menunjukkan AS tidak berpihak pada Palestina yang berada dalam posisi tertindas, bahkan dibantai oleh Zionis Israel (Kobarsyih, 2024). Dari paparan tersebut, respons Indonesia terhadap keputusan sepihak AS menunjukkan bahwa Indonesia sebagai aktor negara cenderung membela negara yang memiliki kesamaan identitas (dalam hal ini Palestina karena memiliki kesamaan identitas, yaitu Islam). Indonesia berperilaku dalam situasi yang relevan dengan kelompok identitasnya. Dalam ruang lingkup internalnya pengaruh masyarakat Indonesia terutama pengaruh ormas Islam dan solidaritas dukungan Indonesia terhadap Palestina sebagai negara muslim memperkuat argumen bahwa walaupun bukan faktor utama dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia, tetapi dalam kondisi tertentu faktor Islam dapat menjadi determinan pengaruh dukungan Indonesia terhadap Palestina.

KESIMPULAN

Fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia telah membuat ketertarikan tersendiri bagi kalangan akademis untuk mengkaji peran agama, terutama Islam sebagai identitas dari mayoritas penduduk Indonesia dalam penyelenggaraan dan pengelolaan negara, termasuk dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dinamika terkait apakah Islam memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri Indonesia telah menjadi wacana tersendiri yang terbukti melalui kajian terkait Islam dan kebijakan luar negeri Indonesia yang telah ada sejak era Presiden Soekarno.

Penulis menemukan dinamika terkait adanya keterkaitan Faktor Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia era Presiden Jokowi tahun 2014-2019, terutama jika dikaitkan dengan dukungan Indonesia terhadap Palestina. Pada masa kepemimpinan Joko Widodo, Islam bukanlah faktor primer dalam formulasi kebijakan luar negeri Indonesia. Islam menjadi faktor sekunder yang dalam kondisi tertentu Islam dapat menjadi pengaruh terutama terkait implementasi dukungan Indonesia terhadap Palestina. Terlebih, dalam visinya Presiden Jokowi mengatakan ingin menata kembali peran Indonesia terhadap urusan global dan diimplementasikan dalam keaktifan Indonesia berperan di dunia Islam, termasuk berkaitan dengan dukungan Indonesia terhadap Palestina.

Keterlibatan masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam dan keterkaitan ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi bukti bahwa faktor Islam dalam batasan-batasan tertentu dapat menjadi pengaruh dalam implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia terkait dukungan Indonesia terhadap Palestina. Bahkan, isu Palestina telah menjadi perhatian besar bagi masyarakat Indonesia seperti mahasiswa, dosen, dan ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU. Hal ini menunjukkan bahwa selain pemerintah Indonesia mempunyai posisi yang jelas terhadap isu Palestina sesuai amanat konstitusi, Di lain sisi rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ikut bergerak sehingga dukungan masyarakat yang mayoritas Islam punya pengaruh besar terhadap implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia terutama terkait dukungan Indonesia terhadap Palestina.

Dari segi eksternal. Nilai-nilai Islam yang universal dapat menjadi pengaruh dukungan Indonesia terhadap Palestina di forum internasional seperti dalam OKI. Dalam Piagam OKI dijelaskan bahwa panduan utama negara-negara anggota OKI dalam bertindak adalah nilai-nilai Islam yang luhur tentang persatuan dan persaudaraan. Dalam piagam tersebut dijelaskan secara eksplisit bahwa tujuan OKI didirikan salah satunya adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Sama halnya dengan Piagam OKI. Dalam piagam PBB terdapat persamaan nilai-nilai universal Islam tentang menjaga keharmonisan antara sesama manusia, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga perdamaian dunia. Penulis melihat nilai-nilai universal Islam dapat menjadi pengaruh secara eksternal terkait dukungan Indonesia terhadap Palestina di fora internasional. Hal ini merupakan implikasi dari identitas Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat yang beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Burchill, S. 2005. *Theories of International Relations*. (Third edition ed.). New York. Palgrave Macmillan.
- Creswell, W. John. 2014. *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Singapore: Sage Publication.
- Fox, J. & S, Sandler. 2004. *Bringing Religion Into International Relations*. PALGRAVE MACMILLAN
- Griffiths, M. (Ed.). 2007. *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction* (1st ed.). London. Routledge.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2013. *Introduction to International Relations Theories and Approaches*. New York Fifth editions: Oxford University Press Inc.
- Neuman W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 7th Edition. London. Pearson.
- Sukma, R. 2003. *Islam in Indonesian Foreign Policy*, London: Routledge.
- Tim Presiden RI, 2016. *2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Akselarasi Menuju Indonesia Sentris*. Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.
- Weber, C. 2021. *International Relations Theory: A Critical Introduction* (5th ed.). London. Routledge.
- Wendt, Alexander. 1999. *Social theory of international politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Al-Syahrin, M. Najar. 2018. Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, Vol. 3, No. 1.
- Alvian, A.R, Ganesha Cintika Putri, & Irfan Ardhani. 2017. Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi ‘Middle Power’ Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 6. No. 2.
- Andika, Tri Muhammad. 2016. An Analysis of Indonesia Foreign Policy Under Jokowi’s Pro-People Diplomacy. *Indonesian Perspective*, Vol. 1, No. 2.
- ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of Migrant Workers' Rights, 2017

- Azra, A. 2000. Islam in Indonesian Foreign Policy: Assessing Impacts of Islamic Revivalism during the Soeharto Era. *Studia Islamika*, Vo. 7, No. 3.
- Bachtiar, Hasan Dkk, 2021. Indonesian progressive Muslims and the discourse of the Israeli-Palestinian peace: Soekarno's, Abdurrahman Wahid's and Ahmad Syafii Maarif's thoughts. *Journal of Social Studies (JSS)*, Vol. 17. No. 1, pp. 1-20.
- Badjodah, Aswir F, Mahfud Husain, Saiful Ahmad. 2021. DINAMIKA KONFLIK DAN UPAYA KONSENSUS PALESTINA-ISRAEL (Studi Kasus Perjanjian Perdamaian Oslo (Oslo Agreement) Tahun 1993). *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol.1, No.3.
- Budiyono. 2013. Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 3.
- Charter of the Organisation of Islamic Cooperation
- Charter of the United Nations
- Delanova, Olivia Mariane. 2017. Politik Luar Negeri Pemerintahan Presiden Joko Widodo Melalui Ekonomi. *Dinamika Global*, Vol 02. No. 02.
- Dharossa, Tryas. & Teuku Rezasyah. 2020. Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019). *Padjadjaran Journal of International Relations e* Vol. 2 No. 1.
- Forcese, Craig. 2006. "The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the War on Terror". *European Journal of International Law*, 17 (2): 374-384.
- Gati, Muhammad Irfan & Abd Hafid. 2024. Indonesia's Diplomatic Contribution to the Israel-Palestine Conflict Since 1948. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*. Volume 2 No. 2.
- Haryanto, Agus. 2014. PRINSIP BEBAS AKTIF DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI PERAN. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Volume IV No. II.
- Karim, Abdul Gaffar. 2019. Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*. Volume 10, Nomor 2.
- Larasati, Cindy. & Ester Desy Natasya. 2017. Peran Indonesia di G-20: Peluang dan Tantangan, *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol 10, No.2.
- Mahadana, J.S. 2023. Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Jokowi: Perkembangan, Prioritas, dan Tantangan, *ADVANCES in Social Humanities Research* Vol 1 No. 10. Makkah Al-Mukkaramah Declaration. 2019
- Muchsin, Misri A. 2015. Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *MIQOT* Vol. XXXIX No. 2.
- Mudore, Syarif bahaudin. 2019. PERAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA. *Jurnal CMES*. Volume XII Nomor 2.
- Muttaqien, M. 2013. Domestic Politics and Indonesia's Foreign Policy on the Arab-Israeli Conflict. *Global & Strategis*, Th. 7, No. 1.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2015, KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA JOKO WIDODO DAN IMPLIKASI INTERNASIONALNYA (*Maritime Axis Policy and Its International Implications*). *Politica*. Vol. 6 No. 2
- Nugraha, Tian Adhia & MauraAudy. 2023. Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi 'Keamanan Manusia' di Palestina. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*. Vol. 8 No. 2.
- Paramitaningrum, Richa V. Yustikaningrum, dan Galuh Dian Prama Dewi. 2018. Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri. *Global & Strategis*, Th. 12, No. 1.
- Prasetya, Muh. Novan & Aulia Srifauzi. 2018. Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina. *Jurnal PIR* Vol. 2 No. 1.

- Putri, Alvela Salsabila. 2020. G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*. Tahun XIII, No.1.
- Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Indonesia 2015-2020
- Rosyidin, M. 2017. Foreign policy in changing global politics: Indonesia's foreign policy and the quest for major power status in the Asian Century, *South East Asia Research*.
- Saragih, Hendra Maujana. 2018. Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut China Selatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Volume VIII No. 1.
- Saragih, Hendra Maujana. 2018. Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mendukung Palestina sebagai Negara Merdeka pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol. 3, No. 2.
- Saraswati, Ni Made Vira.2019. Menilik Perjanjian Indonesia-Cina dalam Kerangka Belt and Road Initiative (BRI) dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI* | Edisi 38.
- Situmorang, M. 2015. Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11(1).
- Strange, Susan. States, Firms and Diplomacy. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, Vol. 68, No. 1.
- Sulistyani, Yuli Ari. Andhini Citra Pertiwi & Marina Ika Sari. 2021. Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Admininstration. *Politica* Vol. 12 No. 2.
- Sundari, R., Prayuda, R., & Venita Sary, D. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar. *JurnalNiara*, 14(1), 177–187. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.6011>
- Suryadinata, L. 1995 Islam and Suharto's Foreign Policy: Indonesia, the Middle East, and Bosnia. *University of California Press*. Vol. 35, No. 3 pp. 291-303.
- Umar Mardhatillah. A.R 2016 Genealogy of Moderate Islam: Governmentality and Discourses of Islam in Indonesia's Foreign Policy. *Studia Islamika* Vol. 23, No. 3.
- Umar, A. R. M., & Alles, D. (2018). [Review of Transnational Islamic Actors and Indonesia's Foreign Policy: Transcending the State]. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 174(2/3), 291–294. <http://www.jstor.org/stable/26455395>.
- UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Bab V tentang Perlindungan WNI.
- Vienna Convention on Consular Relations. 1963.
- Vienna Convention on Diplomatic Relations. 1961.
- Washil, Izzuddin. & Ahmad Khoirul Fata. 2017. Ham Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu. *MIQOT* Vol. XLI No.
- Widiatmatja, Aji & Ulul Albab. 2019. Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional Indonesia under Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo: Foreign Policy in the Middle of Regional Strategic Environment Dynamics. *Politica* Vol. 10 No. 2
- Widodo, Joko dan Jusuf Kalla, 2014. Visi Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014: Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf. Wiradipraja, E. Saefullah. 2003. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Islam. *Mimbar*. Volume XIX No. 2 118 – 134.
- Yegar, Moshe. 2006. The Republic of Indonesia and Israel. *Israel Affairs*, 12:1.
- Zaman, Alie Noer. 2020. Keterlibatan Pemerintahan Joko Widodo Dalam Upaya Perdamaian Di Afghanistan. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*. Volume 1 No.2.

- Antara News. 2011. NAM Meeting in Bali Momentum to Garner Support for Palestine. <https://en.antaranews.com/news/72003/nam-meeting-in-bali-momentum-to-garner-support-for-palestine>
- BBC Indonesia News. 2017. Hubungan Rahasia Indonesia-Israel: Operasi Alpha, Temu Soeharto-Rabin, Pembelian Pesawat Tempur. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42305112>
- BBC News Indonesia. 2011. Indonesia Melobi OKI dan GNB Untuk Palestina. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/09/110922> indonesiapalestine
- CNN Indonesia. 2023. Menelisik Polemik Hubungan Diam-Diam Indonesia-Israel. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230421084703-120-940466/menelisik-jejak-polemik-hubungan-diam-diam-indonesia-israel/2>
- Detik News. 2021. Palestina Mengakui Kedaulatan Indonesia Pada 1944, ini Sejarahnya. <https://news.detik.com/internasional/d-5588577/palestina-mengakui-kedaulatan-indonesia-pada-1944-ini-sejarahnya>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2010. RI Tegaskan Dukungan Untuk Kemerdekaan Palestina <https://www.tabloiddiplomasi.org/ri-tegaskan-dukungan-untuk-kemerdekaan-palestina/>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2019b. Isu Palestina. https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2019c. FM Marsudi Chairs the Un Security Council Meeting Discussing Situation In The Middle East. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/307/view/fm-marsudi-chairs-the-un-security-council-meeting-discussing-situation-in-the-middle-east>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2019d. Isu Palestina. https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina#
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2022. Indonesia Usung Semangat Pulih Bersama Dalam Presiden G20 Tahun 2020. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3288/berita/presidensi-g20-indonesia#:~:text=G20%20adalah%20forum%20internasional%20yang,%2C%20dan%2060%25%20populasi%20global.>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. Indonesia-Palestina. <https://www.kemlu.go.id/amman/id/pages/indonesia-palestine/2415/etc-menu>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2019a. Isu Kemanusiaan. https://kemlu.go.id/portal/id/read/88/halaman_list_lainnya/isu-isu-kemanusiaan
- Kominfo. 2017. Tiga Untuk Kebangkitan Asia Afrika https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5662/Tiga+Untuk+Ke_bangkitan+Asia-Afrika+/0/infografis
- Kominfo. 2017. Jokowi: Indonesia Mengcam Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem. https://www.kominfo.go.id/content/detail/11863/jokowi-indonesia-mengcam-pengakuan-sepihak-as-atas-yerusalem/0/sorotan_media
- Kompas. 2015. Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Yang Membahas Jerussalem <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/12/04503041/Indonesia.Jadi.Tuan.Rumah.Konferensi.yang.Membahas.Jerusalem>
- Kompas. 2015. PNU: Perlu Langkah Konkret Dukung Kemerdekaan Palestina. <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/24/15355821/PNU.Perlu.Langkah.Konkret.Dukung.Kemerdekaan.Palestina.>
- Kompas. 2017. Menteri Susi: 236 Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan Sepanjang 2016. http://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/17/165433626/menteri.susi.236_kapal.pencuri.ikan.ditenggelamkan.sepanjang.2016
- Kompas. 2022. Palestina Mengakui Kemerdekaan Indonesia Bahkan Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

<https://www.kompas.com/global/read/2022/08/16/140100070/palestina-mengakui-kemerdekaan-indonesia-bahkan-sebelum-proklamasi-1945>

Liputan 6. 2017. Di Sidang PBB, Indonesia Menentang Pengakuan Atas Yerusalem. <https://www.liputan6.com/global/read/3203794/di-sidang-pbb-indonesia-menentang-pengakuan-atas-yerusalem?page=2>

Sekretaris Kabinet RI. 2015. Akhiri KTT LB OKI ke-5, Presiden Jokowi Suarakan Pesan Keras Pemimpin Islam terhadap Konflik Palestina. <https://setkab.go.id/akhiri-ktt-lb-oki-ke-5-presiden-jokowi-suarkan-pesan-keras-pemimpin-islam-terhadap-konflik-palestina/>

Sekretaris Kabinet RI. 2015. Inilah Hasil-Hasil KTT Asia Afrika ke-60, Di Jakarta, 22-23 April 2015. <https://setkab.go.id/inilah-hasil-hasil-ktt-asia-afrika-ke-60-di-jakarta-22-23-april-2015/>

Kementerian Sekretariat Negara. 2016. Kontribusi Nyata Indonesia Untuk Palestina Melalui KTT LB OKI ke-5. https://setneg.go.id/baca/index/kontribusi_nyata_indonesia_untuk_palestin_a_melalui_ktt_lb_oki_ke-5

Kementerian Sekretariat Negara. 2017b. Indonesia Kecam Pengakuan Sepihak Amerika Serikat Terkait Jerusalem. https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_kecam_pengakuan_sepihak_k_amerika_serikat_terkait_jerusalem

Kementerian Sekretariat Negara. 2017a. Indonesia-Afghanistan Sepakat Tingkatkan Kerja Sama. https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_afghanistan_sepakat_tingkatkan_kerja_sama

Kementerian Sekretariat Negara. 2018. Presiden Jokowi: Indonesia Mendukung Perdamaian di Afghanistan. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_indonesia_mendukung_perdamaian_di_afghanistan

NU Online. 2021. Sejarah Perjuangan NU Membela Palestina. <https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-perjuangan-nu-membela-palestina-PXftV>

NU Online. 2023. Prof. Quraish Shihab Sebut Piagam PBB Memiliki Prinsip yang Sama dengan Islam. <https://www.nu.or.id/nasional/prof-quraish-sebut-piagam-pbb-memiliki-prinsip-yang-sama-dengan-islam-KzZ39#:~:text=Cendekian%20Muslim%20Indonesia%2C%20Profesor%20Muhammad,Yakni%2C%20harmonisasi%20dan%20membangun%20kedamaian>

Republika. 2014. Muhammadiyah Gelar Forum Perdamaian. <https://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/11/06/nelvge14-muhammadiyah-gelar-forum-perdamaian-dunia>

The New York Times. 2017. Video and Transcript: Trump's Speech Recognizing Jerussalem as the Capital of Israel. <https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleeast/trump-israel-speech-transcript.html>

The New York Times. 2017b. Trump Recognizes Jerusalem as Israel's Capital and Orders U.S. Embassy to Move. <https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleeast/trump-jerusalem-israel-capital.html>

UGM. 2019. NU and Muhammadiyah Have Role in World Peace. <https://ugm.ac.id/en/news/17617-nu-and-muhammadiyah-have-role-in-world-peace/>

United Nations. 2015. Internasional Conference on Question of Jerussalem, Jakarta Opening Session Press Release. <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-205302/>

VOA Indonesia. 2017. Menlu RI: Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel akan Kubur

Proses Perdamaian. <https://www.voaindonesia.com/a/menlu-pengakuan-yerusalem-sebagai-ibu-kota-israel-akan-kubur-proses-perdamaian/4153042.html>

VOA. 2017. *Indonesia urges UN to declare fish theft a transnational crime.* <https://www.voanews.com/a/indonesia-urges-united-nations-declare-fish-theft-transnational-crime/3895243.html>

